

PERJUANGAN NU DAN KOMITMEN KEBANGSAAN

Tidak ada yang membantah bagaimana peran NU dalam perjalanan bangsa ini, baik di era penjajahan, merebut kemerdekaan, hingga masa mengisi kemerdekaan. Peran-peran itu tentu saja menjadi bagian tak terpisahkan dari peran NU mewujudkan negara merdeka. Sebagai tanggung jawabnya adalah mengisi kemerdekaan ini dengan segenap jiwa dan raganya. Dalam perjalanan bangsa, peran NU tidak bisa dikesalkan begitu saja. Terlihat bagaimana sejak perjuangan merebut kemerdekaan, para ulama yang dalam perkembangannya menjadi pendiri NU turut ambil bagian dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan Resolusi Jihad melawan penjajah merupakan salah satu bukti nyata keterlibatan NU dalam perjuangan kemerdekaan. Resolusi Jihad ini menjadi amunisi bagi perjuangan *arek-arek Suroboyo* dalam mengusir penjajah. Hari yang dikenal dengan Hari Pahlawan itu tidak luput dari perjuangan NU dalam mengobarkan perlawanan terhadap penjajah.

Masih banyak fakta keterlibatan NU dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sejak berdirinya, persoalan kebangsaan menjadi salah satu inspirasinya. Nahdlatul Wathon, organisasi pra-NU, misalnya muncul sebagai medium mengorganisir kekuatan melawan penjajah. Peran-peran semacam inilah yang senantiasa dilakoni NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan terbesar di Indonesia.

Untuk membincang persoalan ini, Ahmad Fawaid Sjadzili dari Jurnal Tashwirul Afkar mewawancarai Wakil Rais 'Aam PBNU, Prof. Dr. KH. M. Tholhah Hasan untuk membincang banyak hal terkait dengan perjalanan jam'iyah NU, peran politik NU, dan perjuangan NU dalam mengawal republik ini.[afs]

Prof. Dr. KH. M. Tholhah Hasan (Wakil Rais 'Aam PBNU):

POLITIK KEMASLAHATAN DAN KEUMMATAN SALAH SATU WAWASAN POLITIK NU



Bagaimana konsep dasar politik NU dalam konteks fiqh siyasah?

Saya akan memulainya dari yang lebih dasar lagi bahwa NU itu mendakwa diri sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang dapat dipertanggungjawabkan di Indonesia. Itu menurut penilaian NU. Kalau NU terlibat dalam masalah kenegaraan, itu karena ada anggapan bahwa masalah kenegaraan merupakan bagian dari Sunnah Nabi. Andaikata NU itu tidak mengakui bahwa Nabi itu per-

nah mendirikan sebuah kekuasaan di Madinah melalui apa yang dikenal dengan *Mitsaq Madinah* (Piagam Madinah), mungkin tidak sekuat ini NU sebagai kelompok atau golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah melibatkan diri atau siap terlibat terus-menerus dalam dunia politik sebagai bentuk bahwa itu Sunnah Nabi. Apalagi ulama-ulama juga menganggap diri mereka sebagai *waratsatul anbiya'*, pewaris Nabi, termasuk mewarisi hal-hal semacam ini. Jadi agenda-agenda Sunnah Nabi adalah mendirikan sebuah sistem kekuasaan yang dinamakan negara. Ini kemudian dilanjutkan dengan dokumen-dokumen epistemologis mengenai masalah bagaimana sebetulnya menegakkan pemerintahan dalam pandangan Sunni, terutama yang diwakili oleh dua tokoh Sunni terkemuka dengan buku yang judulnya sama (*al-Ahkam as-Sulthaniyyah*), yaitu Abu Ya'la dan al-Mawardi, yang menganggap minimal untuk mendirikan negara/pemerintahan adalah *fardlu kifayah* (kewajiban kolektif). Jadi kalau ada golput sebenarnya gak apa-apa, asal tidak semuanya.

Sampai hari ini sebetulnya pegangan epistemologis kepolitikan fiqih (*fiqhus siyasyah*) dalam NU masih pada al-Mawardi, meskipun tesis-tesis al-Mawardi sekarang sudah sulit untuk diterapkan dalam konteks negara bangsa. Tapi ada satu tesis yang paling umum bahwa menegakkan suatu pemerintahan itu *fardlu kifayah*. Ulama-ulama di Indonesia, baik dalam kapasitasnya sebagai *waratsatul anbiya'* yang diakui maupun dalam dasar pengetahuan tentang politik bahwa negara itu

harus ditegakkan, sangat terpengaruh dengan pandangan ini. Karena itu, sejak awal, pada saat masalah-masalah fiqih itu sudah menjadi satu bingkai kehidupan umat Islam di Indonesia, terutama NU, maka masalah fiqih politik juga menjadi satu bagian dari para ulama. Lepas dari pemikiran ini sebetulnya ada bagian-bagian yang sudah tidak relevan lagi, tapi secara umum masih digunakan.

Bagaimana jika dikaitkan dengan pilihan NU pada sistem politik yang ada? Sebagaimana kita ketahui, Nabi tidak pernah mewariskan sistem pemerintahan tunggal dan final, termasuk juga yang diwarisi para khulafa'ur rasyidun?

Justru inilah peluang bagi umat Islam di Indonesia, terutama NU, bahwa Islam di Indonesia itu merupakan Islam yang unik. Islam di Indonesia itu unik, dan mudah-mudahan keunikan itu tidak tergeser oleh kehadiran Islam-Islam fundamental. Islam di Indonesia ini adalah Islam yang selalu beradaptasi dengan realitas kulturalnya. Saya kira pilihan ini sudah cukup bagus, bahwa di dalam menerjemahkan masalah-masalah agama, termasuk dalam syari'ah, kita tidak meninggalkan realitas lingkungan sosial. Ini sampai sekarang masih dilakukan oleh NU. Karena itu, apa yang dilakukan oleh NU bila kita bandingkan dengan apa yang dilakukan masyarakat Islam Timur Tengah atau Asia Selatan, jelas tidak sama. Kita bisa menyesuaikan nilai-nilai Islam. Artinya, Islam universal sebagian tetap kita gunakan, tapi Islam

secara partikular untuk Indonesia kita kembangkan.

Apakah ini yang menjadi alasan kenapa NU membela tanah air dengan menolak bentuk Negara Islam?

Jadi sebenarnya sejak dulu, masalah keyakinan bahwa kita itu punya wilayah yang kita sebut sebagai tanah air. Kesadaran untuk mengakui adanya wilayah, katakanlah sekarang disebut nasional, nasionalisme, itu sesungguhnya merupakan salah satu *platform* politik yang paling asasi. Karena itu, jauh sebelum muktamar di Banjarmasin, orang cerdas seperti Mbah Wahab Chasbullah sudah membentuk *Nahdlatul Wathan* dalam pendidikan. Kalimat *al-wathan* sebetulnya merupakan suatu pengakuan bahwa Indonesia itu satu *wathan* (tanah air). Sebab *wathan* itu tidak kita jumpai dalam gerakan-gerakan Islam yang lain. Ada gambaran bahwa *hubbul wathan minal Iman* (ini sering disebut sebagai Hadis tapi sampai saat ini saya belum menemukan bahwa ini adalah Hadis) merupakan pengakuan bahwa di kalangan NU sendiri mereka sudah menyadari perlunya ada *wathan*. Pengakuan adanya satu wilayah kesatuan bangsa itu sebetulnya merupakan pengakuan adanya kesadaran politik yang sangat asasi.

Tapi mengapa *wathan* yang diakui NU ini menolak model Negara Islam?

Ini yang tadi saya katakan bahwa ini merupakan keunikan pemikiran NU yang adaptatif dan akomodatif. Sebab apa? NU dalam hal itu bukan hanya mengurus masalah pemurnian, tapi juga

masalah kemaslahatan sebagai bangsa jelas menjadi bahan pertimbangan. Sebagaimana diketahui, tujuan mendirikan suatu negara, di samping *harasatud din* (menjaga agama) adalah *mashalihul ummah* (kepentingan warga). Ini yang dijadikan pertimbangan. Jadi sebenarnya politik kemaslahatan dan keummatan menjadi salah satu di antara wawasan politik dalam NU di samping masalah kekuasaan.

Terkait dengan persoalan tadi, saya akan beralih pada perbincangan seputar *khittah*. Karena saya pikir ada titik temunya. Kenapa dalam konteks *khittah*, NU paling awal menerima Pancasila. Kira-kira semangat *khittah* itu apa?

Sebetulnya, masalah itu hanyalah *trigger* saja. Bukan masalah yang sangat dominan. Jauh sebelum Muktamar di Sitobondo, sebetulnya di kalangan para pemikir muda muslim muda sering mengadakan pertemuan-pertemuan. Pada saat itu, Menteri Agamanya adalah Pak Alamsyah Ratu Prawiranegara. Pertanyaan utamanya saat itu, mengapa kekuatan Islam di Indonesia yang begitu besar tidak bisa memanfaatkan kekuasaan yang juga dipegang oleh seorang Muslim, yaitu Pak Harto. Tetapi sebaliknya waktu itu justru mengapa Pak Harto lebih banyak dimanfaatkan oleh orang-orang non muslim. Waktu kasus ini terakhir kita bicarakan di Cisarua(?), yang kebetulan Pak Alamsyah juga datang, akhirnya ada semacam kesepakatan tidak tertulis, kalau tidak dijadikan sebuah keputusan, ada satu yang menyebabkan kesulitan

umat Islam dengan potensi sangat besar tidak bisa dekat dengan kekuasaan pemerintah. Yaitu, umat Islam belum memberikan keyakinan pada pemerintah bahwa umat Islam tidak mengganggu gugat masalah Pancasila. Padahal militer saat itu, termasuk Pak Harto, menganggap bahwa masalah Pancasila adalah masalah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu merupakan suatu pandangan hampir semua militer dan kaum nasionalis lainnya. Pertimbangannya menjadi begini, apakah dengan satu Pancasila, yang juga ini telah diterima oleh para *founding fathers* kita, apa ruginya jika kita mendekat kembali pada masalah Pancasila dengan kompensasi bahwa umat Islam bisa mengakses kekuasaan. Paling tidak, kita tidak menjadi orang yang selalu dicurigai, sehingga kita mengalami suatu kesulitan. Hal itu yang terus-menerus terjadi jauh sebelum Muktamar Sitobondo. Terus ada *trigger*. Kalau masalah NU dipinggirkan itu hanyalah *trigger*. Pada waktu itu, ketika saya menjadi pengurus NU di Jawa Timur, dan kebetulan juga menjadi MPP PPP di Jawa Timur, saya menulis untuk seminar terkait posisi dilematis NU, apakah NU tetap dalam PPP atau NU ada di luar PPP? Seminar ini tidak jadi karena suatu hal. Tapi tulisan saya masih ada dan *nyampe'* juga di tangan Gus Dur, Fahmi Ja'far, K. Masykur, dsb. Waktu itu saya membuat satu pertimbangan begini, NU pada tahun 1980-an, realitasnya NU sudah memiliki suatu dinamika, yang dinamika ini melampaui daya tampung partai politik yang ada saat itu, PPP, Golkar, dan PDI. Dari sisi apa? Hampir dari

semua sisi. Misalnya, *pertama*, dari segi ajaran. Ajaran yang dilakukan orang NU selama ini tidak hanya dilakukan orang PPP saja, tapi juga orang Golkar, seperti qunut, tahlil, dll. Ritual yang didakwa sebagai simbol-simbol NU sudah dipakai oleh orang-orang di luar PPP. Jadi sebetulnya secara kultural, NU tidak bisa ditampung dalam satu partai, tapi sudah melebar ke mana-mana. Mungkin juga melebar ke PDI.

Kedua, dari segi NU sebagai jama'ah. NU sebagai jama'ah sudah tidak hanya berada di PPP, tapi menyebar ke berbagai kekuatan politik, baik dalam partai maupun dalam institusi yang lain. Orang NU sudah banyak yang menjadi birokrat. Pada waktu itu, kalau sudah menjadi KORPRI, sudah pasti menjadi Golkar, tidak mungkin PPP. *Ketiga*, selain aspek ritual dan kejama'ahan NU, adalah selama NU aktif di partai politik, disengaja atau tidak, sejak masa sebelum Pak Idham hingga masa Pak Idham selama 30 tahun itu, praktis amanat untuk melayani umat oleh NU tidak tergarap dengan baik. Pendidikan mandul, tidak punya satu perguruan tinggi pun yang patut dibanggakan. Rumah sakit praktis tidak ada, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi juga tidak tergarap. Sehingga kita hanya mendapatkan suatu jabatan-jabatan, tapi jabatan itu tidak bisa mengangkat kualitas pelayanan kita pada umat. Karena, semua elit NU terkonsentrasi pada perebutan jabatan 'politis'. Kalau itu hasilnya selama ini, kapan kita berpikir untuk melayani umat. Kapan kita bisa mengejar dalam

bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, dll, kalau hanya dapat kursi sekian menteri, dapat duduk dalam kekuasaan. Oleh karena itu, kita memikirkan, apakah tidak lebih terbuka andaikata NU tidak terikat dalam wadah satu partai, sehingga NU menjadi payung besar yang bisa memayungi kekuatan-kekuatan yang ada. Berangkat dari itu semua, ditambah dengan *trigger* baru yaitu NU *diorat-arit* oleh Naro, kian kelihatan bahwa potensi NU menjadi tidak berarti kalau hanya untuk duduk dalam satu partai tapi potensi atau *masalah* yang lain tidak terjamah.

Apakah bisa dikatakan, jika tidak ada trigger itu, NU tidak sadar-sadar untuk kembali ke khittah?

Saya kira bisa dikatakan begitu. Dalam NU saat itu memang ada istilah NU kultural dan NU politik. NU kultural kebanyakan dari kalangan terdidik, terpelajar, yang muda-muda. Kalau orang yang lama-lama itu *kan* kebanyakan NU politik. Jadi saat itu sudah mulai terkotak-kotak begitu. Dengan adanya perubahan melalui kembali ke khittah, polarisasi dan pengkotak-kotakan itu bisa dipertemukan lagi. Sehingga sekarang NU bagaimana? Dalam berpolitik ini, ada dua sektor yang bisa dimasuki NU, tapi dengan cara berbeda, yaitu politik kekuasaan melalui Parpol dan politik keumatan dalam bentuk pemberian pelayanan umat.

Kalau bisa diperjelas, siapa yang berwenang untuk aktif di politik parpol

dan siapa yang berwenang untuk aktif di politik keumatan?

Pada waktu itu, di dalam Munas hingga Muktamar, kita tidak sama sekali menutup mata terkait masih adanya sisi yang penting terkait dengan politik. Karena dalam rekomendasi kita, ada 9 cara berpolitik dalam NU yang telah dirumuskan dalam konteks khittah. Artinya, dalam NU tidak melarang warganya untuk berkiprah dalam dunia politik sesuai dengan minat dan bakatnya, boleh menyalurkan minat dan bakatnya ke partai-partai yang ada. Tapi yang tidak menjadi bagian dalam politik adalah NU sebagai organisasi. Sampai saat ini, NU tidak melarang warganya berpolitik. Yang tidak diperbolehkan adalah adanya kejumuhan antara pengurus NU sebagai pengurus organisasi yang tidak terikat politik apabila ia merangkap sebagai pengurus partai politik.

Tadi Kiai mengatakan bahwa dalam khittah, NU di mana-mana dan tidak ke mana-mana. Terkait dengan fenomena terakhir, banyak muncul partai-partai yang secara ideologis bertentangan dengan ideologi NU. Apakah pemahaman khittah semacam itu masih relevan?

Itu sebetulnya bisa saja dilakukan pendefinisian ulang terhadap khittah. Tapi juga masalahnya jangan hanya dipersempit pada konteks kepartaian. Karena yang perlu disadari, kebesaran dan kekuatan NU, yang fungsional itu jauh lebih besar ketimbang yang struktural. Sekarang, dalam rentang waktu mulai masa-masa era khittah sampai

sekarang, birokrat-birokrat yang dari NU sudah ada di semua departemen dan lembaga-lembaga pemerintah yang dulu ini sulit dilakukan. Ini menunjukkan satu kekuatan NU dalam birokrasi begitu besar. Ini yang pertama.

Kedua, akademisi. Sekarang tokoh akademisi-akademisi NU telah merambah hampir semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, baik perguruan tinggi agama maupun perguruan tinggi umum. NU barangkali tidak pernah menghitung, berapa doktor maupun profesor yang muncul dari NU sekarang ini. *Ketiga*, enterpreuner. Sekarang, pengusaha-pengusaha NU bermunculan di mana-mana. Jadi NU memiliki kekuatan-kekuatan yang di luar struktur justru lebih strategis. Jadi, kalau yang kita pikirkan hanya NU pada koridor struktural dan melupakan NU dalam koridor fungsionalnya ini tentu kerugian besar bagi NU. Jadi, kalau kita mendefinisikan bahwa NU tidak ke mana-mana tapi ada di mana-mana, maka hal ini harus dijadikan pertimbangan. Bukan hanya NU secara struktural, tapi juga yang fungsional atau NU sebagai *jam'iyah* dan NU sebagai jama'ah. Ini yang tidak dipikirkan. Sementara ulama yang selama ini dijadikan ikon di dalam NU, tambah lama tambah menurun baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang ada saja sekarang ulama-ulama kita sudah mengalami apa yang saya sebut kesenjangan paradigmatis antara ulama dan umatnya. Apa yang dipikirkan oleh orang yang menganggap dirinya ulama tidak *nyambung* dengan apa yang diharapkan oleh umat. Akibat-

nya terjadi kesenjangan. Kesenjangan itu berakibat bahwa suara ulama tidak begitu *mandi*, ampuh, di telinga umat. Ini menunjukkan bahwa apa yang dirasakan kaum elit ulama dengan apa yang dirasakan oleh umat sudah tidak *nyambung*. Padahal umat sampai sekarang yang menolak ulama tidak ada. Mereka (jama'ah NU) masih ingin ada di bawah payung ulama, tapi sayangnya ulama itu sendiri yang tidak bisa memayungi mereka.

Tapi bagaimana pun kita tidak bisa melepaskan bahwa tugas NU secara struktural sebagai organisasi untuk memberikan pelayanan pada umat. Dalam konteks politik, NU dengan basis massa yang besar ini memiliki kekuatan politik. Bagaimana seharusnya NU memerankan dalam konteks perundang-undangan yang ada, sehingga undang-undang itu benar-benar memihak warga?

Itu bagus sekali. Dalam hal ini, NU harus memiliki sistem jaringan yang bagus. Dalam sebuah organisasi yang bagus, di samping punya aset intelektual, aset sosial, aset finansial, juga ada aset jaringan. NU sesungguhnya memiliki agen-agen di berbagai departemen dan institusi yang saya sebutkan tadi. Tapi NU tidak bisa membangun sistem jaringan yang bagus antara NU dengan agen-agen yang ada. Saya telah mencoba, tapi ini tidak ada yang melanjutkan, mengundang semua anggota NU yang ada di berbagai fraksi, birokrat yang ada di semua departemen, akademisi-akademisi yang ada di berbagai perguruan tinggi, entrepreneur-enterpreuner NU yang ada di

berbagai perusahaan saya undang semua untuk silaturahmi. Dan kita buka bahwa kekuatan NU yang ada di luar struktur sudah muncul begitu besar. Ini kalau dibentuk sebuah jaringan, tentu akan sangat bagus. Saya juga pernah datang ke senayan untuk bertemu dengan anggota legislatif NU lintas fraksi, agar suatu ketika ada pertemuan-pertemuan dengan NU, sehingga apa yang menjadi gagasan pemikiran NU menyangkut politik dan masalah-masalah yang terkait dengan legislasi yang berbau Islam, agar bisa dipahami oleh semua anggota legislatif NU lintas fraksi. Tapi ini juga tidak ada yang melanjutkan.

Apakah karena faktor itu pula, misalnya, dalam perkembangannya banyak muncul perundang-undangan yang merugikan umat. Tapi di internal NU sendiri berbeda persepsi antara realitas umat yang ada dan suara strukturnya. Misalnya ini terjadi dalam kasus Nuklir atau yang lainnya?

Itu betul. Tapi masalahnya ada kesenjangan paradigmatis antara elit NU dengan massa NU. Terjadinya kesenjangan paradigmatis ini bisa jadi karena antara elit dan massa NU sama-sama tidak mengerti, atau rakyatnya lebih mengerti daripada elitnya, atau sebaliknya rakyat tidak mengerti dan elitnya lebih mengerti. Tapi karena ini tidak nyambung antara elit dan warganya sehingga melahirkan kebijakan yang tidak populer bagi warganya.

Lalu seharusnya bagaimana?

Ya organisasi NU harus diperbaiki. Saya katakan, kalau muktamar hanya untuk mempromosikan ketokohan seseorang dan tidak mengkaji secara kritis apa yang dialami umat, padahal NU hadir untuk melayani umat, maka itu sebetulnya suatu kesia-siaan. Saya usulkan dalam rapat di PBNU, NU harus memiliki satu tema yang jelas untuk masa depan NU dan muktamar ini akan memberikan harapan apa pada umat. Saya khawatir umat NU tidak memiliki harapan pada NU. Tentu ini berbahaya. Sekarang saja, umat sudah mulai kurang mengharap sesuatu pada NU, karena NU sudah tidak memberikan sesuatu pada umat. Layanan-layanan pada masyarakat, apakah itu dalam bidang perguruan tinggi, rumah sakit, atau lembaga pengembangan sumber daya manusia di daerah-daerah yang tersebar jarang sekali terakses oleh NU sebagai organisasi. Itu juga menunjukkan bahwa masyarakat NU juga telah tidak begitu berharap kepada NU. Bagi saya, ini satu contoh kecil betapa NU kurang memiliki kepedulian pada peningkatan kualitas pelayanan umat.

Terkait dengan momentum politik akhir-akhirnya, sebenarnya bagaimana posisi strategis NU dalam Pilkada, Pilpres, Pileg dan semacamnya?

Pertama, berikan izin pada orang-orang yang merasa mampu dan pantas dicalonkan. Kedua, NU atau para elit NU tidak usah melakukan dukungan yang transparan untuk memihak pada satu kelompok. Sebab ketika memihak

satu kelompok, berarti tidak memihak pada kelompok yang lain. Melihat kenyataan itu, orang luar NU akan menilai, bagaimana mungkin NU menegakkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin, wong rahmatan lin nahdliyin* saja belum bisa. Andaikata kita tidak begitu, tentu kita punya kader. Masak kita tidak bisa mengatur. Kalau membuat dukungan, gak usah turun sendiri kalau kita merasa punya jaringan.

Kira-kira budaya pesantren apa yang bisa disumbangkan untuk bangsa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, misalnya korupsi, konflik, dll?

Pesantren sampai sekarang di dalam menjaga nilai-nilai Islam, nilai-nilai tradisionalnya, saya kira cukup baik. Tapi daya serap pesantren terhadap masalah-masalah baru, masalah yang berkaitan dengan kepentingan umat, masih sangat lamban. Kita harus memahami, pesantren itu budaya keilmuannya adalah budaya *inqiyad*, mengkonservasi, manut, tidak ada kritisisme di sana. Beda dengan yang di kampus yang budayanya *intiqad* (kritisisme). Ini sekarang di pesantren, di satu sisi ada yang berhadapan antara yang *inqiyad* dan *intiqad*, saling menuduh dan saling mencurigai yang sangat tajam. Di sisi yang lain, tidak ada budaya *intiqad* sama sekali. Di sana terjadi, tetap memelihara yang lama dengan segala kemampuan dan mencurigai segala yang baru. Ini jelas tidak sesuai dengan kaidah *al-muhafadzah alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil*

ashlah. Yang di-*akhdzui* itu yang mana? Lalu di mana perbandingan antara *al-muhafadzah* dan *al-akhdzu*. Saya khawatir yang *al-muhafadzah* 99% dan *al-akhdzu*-nya hanya 1 %. Ini berarti mereka sendiri menggunakan adagium sebagai ungkapan belaka dan belum bisa dipahami dengan bagus. Belum lagi mengenai masalah-masalah yang Anda sebutkan tadi, jelas tidak *nyambung*. Sebab itu dianggap urusan duniawi yang tidak perlu dipikirkan oleh pesantren. Kalau untuk memperbaiki ini, pemimpin pesantren harus digarap. Percuma kita menggarap pesantren kalau pengasuh pesantren itu tidak ada keterbukaan.

Pada tahun 80-an, kita sering melakukan *halaqah-halaqah*, termasuk yang difasilitasi oleh Lakpesdam. Itu lumayan berhasil.

Harapan apa yang dimimpikan kiai dengan NU menjelang muktamar?

Bagi saya, muktamar yang akan datang merupakan pemborosan, pemborosan biaya, pemborosan energi, pemborosan stamina, dan pemborosan waktu kalau acaranya hanya untuk mempromosikan kepemimpinan seseorang. Pengkaderan di dalam NU untuk beberapa waktu itu nol, sehingga untuk memilih pimpinan di tingkat cabang saja sangat sulit. Pemimpin kalau sudah 2 kali tidak ada penggantinya, itu berarti suatu kegagalan. Sebab tugas pemimpin di samping menjalankan tugasnya sebagai pemimpin juga menyiapkan pemimpin baru sebagai penggantinya. Kiainya juga begitu, syuriahnya juga begitu. Kita telah melaku-

kan pendidikan peningkatan syuriah bersama Lakpesdam, tapi pada waktu itu untuk ditindaklanjuti di tingkat wilayah tidak ada yang melakukan, dianggap tidak penting. Kalau begitu bagaimana? Saya minta agar ada satu tema yang jelas, untuk apa muktamar dilakukan, bukan hanya untuk mengisi rutinitas belaka. Saya sudah bilang pada keluarga, bahwa pada tahun 2009 ini, saya telah 50 tahun dalam berkhidmat di NU. Tahun 1959 saya mulai karir di NU dengan menjadi ketua ranting dan hingga kini terus tidak putus hingga 2009. Setelah

50 tahun persis, saya membuat kalkulasi sendiri, bahwa apa yang bisa saya wujudkan dan berikan untuk kepentingan umat di luar jalur struktural NU, ternyata lebih banyak yang bisa saya lakukan ketimbang di struktural NU. Saya bisa mendirikan sekian belas sekolahan, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Ini satu kenyataan yang saya alami, mungkin juga orang lain. Oleh karena itu, dalam muktamar yang akan datang, saya akan tetap menjadi orang NU, akan memberikan sesuatu pada NU, tapi tidak usah menjadi pengurus NU.[]